



JAWA TIMUR
MAJU BERPRESTASI



JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA

E-Learning Sumut Berkah Angkatan V Tahun 2025

STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DI JAWA TIMUR

Disampaikan Oleh :

Dr. MHD AFTABUDDIN RZ, S.Pt. ,M.Si
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

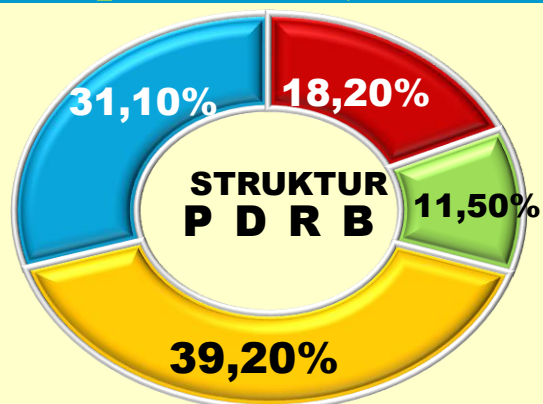


Kamis, 30 Oktober 2025



PDRB JATIM TW II-2025 ADHB

Rp. 849,30 T



INDUSTRI
PERDAGANGAN
PERTANIAN
14 SEKTOR LAINNYA

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur (YOY)
Tahun 2024 - 2025



GARIS KEMISKINAN DAN INFLASI JAWA TIMUR



	2019		2020		2021		2022		2023	2024		2025
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept	Mar
Inflasi	2,35	2,45	2,27	1,30	1,29	1,92	3,04	6,80	6,13	3,04	1,73	0,77
Persentase Perubahan Garis Kemiskinan	6,45	5,05	4,61	3,48	3,16	6,43	7,40	9,61	10,06	5,68	2,17	1,88

Tren **garis kemiskinan** terus menurun seiring dengan **terkendalinya inflasi**. Pada Maret 2025, **inflasi Jawa Timur menurun hingga 0,77% (yoy)**. Sejalan dengan itu, **persentase perubahan garis kemiskinan** juga melandai menjadi **1,88%**, yang mencerminkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat Jawa Timur yang terjaga

Tingginya Kontribusi Jatim Terhadap Pangan Nasional 2024



Cabai Rawit 568.975 ton
Peringkat 1: 36,36% Nasional



Susu 468.712 ton
Peringkat 1: 57,98% Nasional



Daging Sapi 96.907 ton
Peringkat 1: 20,24% Nasional



Jagung 6.216.814 ton
Peringkat 1: 30,36% Nasional



Padi 9.270.435 ton
Peringkat 1: 17,44% Nasional



Pisang 2.773.136 ton
Peringkat 1: 28,63% Nasional

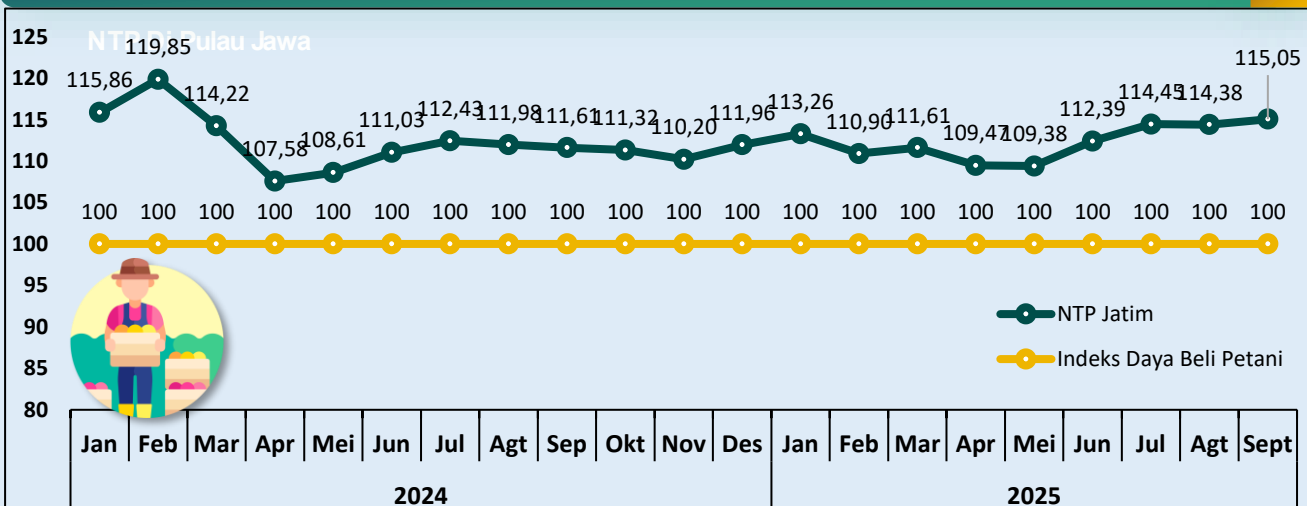


Bawang Merah 476.660 ton
Peringkat 2: 22,85% Nasional



Telur 2.016.324 ton
Peringkat 1: 31,79% Nasional

Daya Beli Petani Terjaga



Lumbung Pangan: Ketahanan Pangan Konsumen



Optimalisasi kinerja produksi melalui penerapan teknologi dan pola tanam yang efisien



Akses pangan (logistik dan distribusi) yang semakin merata melalui sinergi TPID Prov/Kab-Kot

Kesejahteraan Petani/Peternak/Nelayan



Memperkuat kelembagaan produsen melalui Korporasi Produsen sehingga lebih berdaya saing.



Nilai tambah proses Tanam-Petik-Olah-Kemas-Jual dalam rangka hilirisasi Industri Mamin.



Pengaturan pola tanam agar harga stabil karena seimbang antara permintaan dan penawaran.



KEBIJAKAN MONETER

Dukungan kebijakan moneter *pro-stability* dan *pro growth*

- Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksipot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
- Operasi moneter termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);



KEBIJAKAN FISKAL

Optimalisasi APBN dan APBD sebagai *shock absorber*

- Subsidi dan Kompensasi Energi
- Anggaran Ketahanan Pangan termasuk optimalisasi CBP (penyaluran SPHP)
- Program perlindungan sosial
- Stimulus menjaga daya beli
- Optimalisasi APBD dan BTT

STRATEGI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI: 4K



K1

Keterjangkauan Harga

- Peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah/gerakan pangan mudah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
- Bantuan sosial dan pangan, diskon tarif listrik, tol dan transportasi



K2

Ketersediaan Pasokan

- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP dan CPPD)
- Akses pembiayaan KUR dan Kredit Alsintan
- Penyediaan pupuk bersubsidi



K3

Kelancaran Distribusi

- Fasilitasi distribusi komoditas pangan strategis
- Optimalisasi program tol laut untuk menjangkau daerah 3TP
- Pemberian bantuan biaya logistik



K4

Komunikasi Efektif

- Orkestrasi TPID untuk upaya pengendalian inflasi daerah oleh Kemendagri melalui rakor mingguan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi TPIP-TPID per kawasan yang dilaksanakan beriringan dengan GNPIP



INFLASI 2025 TERJAGA SESUAI SASARAN 2,5±1%



No	Upaya Konkrit Pemerintah Daerah	Jumlah Pemda (Update 20 Oktober 2025)
1	Telah melakukan ke 6 (enam) upaya konkret dalam penanganan inflasi	43
2	Telah melakukan 4 (empat) s.d 5 (lima) dari 6 (enam) upaya konkret dalam penanganan inflasi	160
3	Belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi, karena hanya melakukan 1 (satu) s.d 3 (tiga) upaya dalam penanganan inflasi	286
4	Belum melakukan sama sekali upaya konkret dalam penanganan inflasi	25

Sumber : Kemendagri-RI





END STATE

Terjaganya Inflasi IHK Sesuai Sasaran Inflasi Nasional

JATIM KERJA

Stabilitas Ekonomi dan
Pengendalian Harga

K1: Keterjangkauan Harga

1 Penguatan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK)

- Pengembangan EPIK *mobile*
- Kerjasama dengan BUMD/ BUMP/Des sebagai *supplier* pasokan EPIK
- Pengembangan EPIK digital

2 Intensifikasi Pelaksanaan Operasi Pasar

- OPM/GPM lintas instansi
- Sidak pasar

3 Koordinasi Kebijakan Administered Prices

- Penetapan kebijakan AP yg terjadwal

JATIM AGRO

Kesejahteraan produsen, akses optimal sarana
produksi guna mendukung ketahanan pangan

K2: Ketersediaan Pasokan

Ketahanan Pangan

1 Peningkatan Produktivitas

- Penerapan GAP, GFP, GHP, GMP
- Dukungan saprodi
- Dukungan/ modernisasi alsintan
- Dukungan Bimbingan teknis
- Pengendalian hama dan penyakit

2 Pengembangan Kawasan Produksi

- Optimalisasi lahan dan pekarangan
- Pengembangan kawasan agropolitan

3 Peningkatan Infrastruktur Irigasi

- Revitalisasi saluran irigasi (P, S, T)
- Elektrifikasi sawah
- Pompanisasi

Kesejahteraan produsen

1 Penguatan Kelembagaan Petani

- Pengembangan program korporasi petani
- Penguatan lumbung pangan
- Penggunaan merk kolektif dalam pengendalian harga

2 Penguatan Dukungan Pembiayaan Petani

- Penguatan akses pembiayaan
- Mendorong adopsi asuransi pertanian

3 Penguatan SDM Pertanian

- Penguatan *champion* lokal
- Pembentukan Petani Millennial

JATIM AKSES

Penguatan konektivitas
daerah

K3: Kelancaran Distribusi

1 Penguatan Kerjasama Antar Daerah, pada level Pemerintah atau Bisnis

- Penguatan peran BUMD/ BUMP/Des sebagai *offtaker*
- Perluasan KAD Intra Provinsi dan Antar Provinsi (G2G/G2B/B2B)

2 Penyediaan Transportasi

- 1. Fasilitas distribusi pangan
- 2. Pelaksanaan Mudik Gratis
- 3. Penyediaan angkutan antar Kota (trans Jatim), dan dalam kota
- 4. Monev tarif angkutan

3 Peningkatan kualitas infra produksi & konektivitas

- Optimalisasi kemantapan jalan

■ All
■ Provinsi
■ Kab/Kota

K4: Komunikasi Efektif

1 Penguatan Koordinasi Pusat- Daerah

- *High Level Meeting*
- Rapat Koordinasi TPIP-TPID
- Rapat Koordinasi Wilayah
- Rapat Koordinasi Teknis

2 Peningkatan Kualitas Data

- Penguatan SISKAPERBAPO
- Optimalisasi aplikasi Satu Data Jatim
- Penguatan Neraca Pangan Daerah
- Pengembangan *monitoring* harga dan pasokan

3 Pengendalian Ekspektasi Inflasi

- Diseminasi kebijakan teknis dan kampanye program d.r pengendalian inflasi
- 2. Transparasi Harga Melalui Wadah Sosialisasi (Sosmed, Videotron, dsb)

4 Peningkatan Kapasitas Pejuang Inflasi

- TPID Awards Jawa Timur
- Peningkatan kapasitas anggota TPID
- Studi banding *best practice* TPID



GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Sdr. Bupati/ Walikota
di Wilayah Jawa Timur

SURAT EDARAN
NOMOR 500/1136/2021.1/2025 TAHUN 2025

TENTANG
KERANGKA KERJA STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI
JAWA TIMUR TAHUN 2025

Dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi TPID Jawa Timur untuk menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan, maka TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Timur perlu melaksanakan Komitmen Pengendalian Inflasi sebagai berikut :

1. **Stabilisasi Ekonomi dan Pengendalian Harga** melalui (1) Penguatan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK), (2) Intensifikasi Pelaksanaan Operasi Pasar , dan (3) Koordinasi Kebijakan Administered Prices;
2. **Kesejahteraan Produsen, Akses Optimal Sarana Produksi Guna Mendukung Ketahanan Pangan** melalui (1) Peningkatan Produktivitas; (2) Pengembangan Kawasan Produksi; (3) Peningkatan Infrastruktur Irigasi; (4) Penguatan Kelembagaan Petani; (4) Penguatan Dukungan Pembiayaan Petani; dan (5) Penguatan SDM Pertanian;
3. **Penguatan Konektivitas Daerah** melalui (1) Penguatan Kerjasama Intra Provinsi dan Antar Daerah; (2) Penyediaan Transportasi; dan (3) Peningkatan Kualitas Infra Produksi & Konektivitas;
4. **Tata Kelola Efektif, Berdaya Guna, dan Anti Korupsi** melalui (1) Penguatan Koordinasi Pusat – Daerah; (2) Peningkatan Kualitas Data; (3) Pengendalian Ekspektasi Inflasi; dan Peningkatan Kapasitas Pejuang Inflasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

Gubernur Jawa Timur,

Kholidah Indar Parawansa



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI.



Dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi TPID Jawa Timur untuk menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan, pada *High Level Meeting (HLM)* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Jawa Timur yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi pada tanggal 17 Maret 2025, telah disepakati :

1. **Stabilisasi Ekonomi dan Pengendalian Harga** melalui (1) Penguatan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK), (2) Intensifikasi Pelaksanaan Operasi Pasar , dan (3) Koordinasi Kebijakan Administered Prices;
2. **Kesejahteraan produsen, akses optimal sarana produksi guna mendukung ketahanan pangan** melalui (1) Peningkatan Produktivitas; (2) Pengembangan Kawasan Produksi; (3) Peningkatan Infrastruktur Irigasi; (4) Penguatan Kelembagaan Petani; (4) Penguatan Dukungan Pembiayaan Petani; dan (5) Penguatan SDM Pertanian;
3. **Penguatan Konektivitas Daerah** melalui (1) Penguatan Kerjasama Intra Provinsi dan Antar Daerah; (2) Penyediaan Transportasi; dan (3) Peningkatan Kualitas Infra Produksi & Konektivitas;
4. **Tata kelola efektif, berdaya guna, dan anti korupsi** melalui (1) Penguatan Koordinasi Pusat – Daerah; (2) Peningkatan Kualitas Data; (3) Pengendalian Ekspektasi Inflasi; dan Peningkatan Kapasitas Pejuang Inflasi.



Keselarasan Strategi Pusat dan Daerah

Strategi Pengendalian Inflasi

No	6 Langkah Upaya Kemendagri-RI	SE Gubernur Jatim Tentang Kerangka Kerja Pengendalian Inflasi Jatim Tahun 2025	Jumlah (Tahun 2025)		Total
			Provinsi Jatim	Kab/Kota Jatim	
1	Melaksanakan operasi pasar murah	Intensifikasi Pelaksanaan Operasi Pasar	OPM: 121 Kali GPM: 43 Kali	OPM: 1205 Kali GPM: 514 Kali	OPM: 1326 Kali GPM: 557 Kali
2	Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang	Monitoring harga komoditas	<ul style="list-style-type: none"> 15 Sidak Pasar Platform Monitoring Setiap hari (SISKAPERBAPO) 	Platform Monitoring Setiap hari	Setiap hari
		Kepemilikan EPIK (ETALASE PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN/KOTA)	18 EPIK	78 EPIK	96 EPIK
3	Kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan	Penguatan Kerjasama Intra Provinsi	PT JGU dengan Pelaku Bisnis di Jatim (8 Kerjasama)	37 Kerjasama	45 Kerjasama
		Penguatan Kerjasama Antar Provinsi	8 Kerjasama Misi Dagang Dengan Provinsi Lain	18 Kerjasama	24 Kerjasama
4	Gerakan menaman	Peningkatan Produktivitas On-Farm	5 Kali Kegiatan Panen	593 Kegiatan	598 Kegiatan
		Penguatan Kelembagaan Petani (Korporasi Petani)	2 Korporasi Petani	33 Korporasi Petani	35 Korporasi Petani
5	Dukungan transportasi dari APBD	Penyediaan Transportasi	7 Kegiatan (7 Koridor Bus Trans Jatim)	75 Kegiatan	82 Kegiatan
6	Merealisasikan BTT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**Operasi Pasar Murah
(OPM) telah dilaksanakan
128 kali selama periode
bulan Januari - Oktober
2025**

**Gerakan Pangan Murah
(GPM) telah dilaksanakan
43 kali selama periode
bulan Januari - September
2025**



GERAKAN MENAMAN

**Menjaga ketersediaan pasokan pangan aman
dan terkendali**

Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan

9 Januari 2025

Panen Raya Padi Sehat di Dusun Suketi, Desa Kejayan, Kabupaten Pasuruan

7 April 2025

Panen Raya Padi serentak di Desa Kartoharjo, Kabupaten Ngawi

16 Juni 2025

Panen Padi di Kampung Pangan Terpadu (Pandu) di Kompi Produkdi Kodim 0812, Desa Jotosanur, Lamongan

23 Juni 2025

Panen dan Tanam Kebu di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi

24 Juni 2025

Panen Raya Bersama Masyarakat Petani Kopi Ijen di Jampit, Bondowoso



KERJASAMA ANTAR PROVINSI MISI DAGANG

Mempertemukan langsung pelaku usaha antar daerah untuk menjaga stabilitas harga dan memperlancar distribusi pasokan

Tanggal Pelaksanaan	Kerjasama Misi Dagang	Nilai Transaksi
12 Maret 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi Maluku Utara	568 M
23 April 2025	Provinsi Jatim dengan Maluku	460 M
8 Mei 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi Kalimantan Timur	1,053 T
9 Juli 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi NTB	1,068 T
7 Agustus 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi Lampung	1,055 T
17 September 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi Kalimantan Selatan	1,661 T
29 September 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi Sumatera Selatan	1,000 T
18 Oktober 2025	Provinsi Jatim dengan Provinsi Sulawesi Tengah	1,542 T



KERJASAMA INTRA PROVINSI B2B

Kerjasama antara PT Jatim Grha Utama (BUMD Pemprov Jatim) dengan sesama pelaku bisnis di Jawa Timur

Tanggal Kerjasama	Kerjasama
6 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Koperasi Produsen Multi Pihak Jatim Makmur Sentosa Tentang Kerjasama Produksi dan Distribusi Beras
12 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa (Ngawi) Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar
12 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger (Jombang) Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar
12 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Koperasi Konsumen Gubeng Maju Bersama Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar
12 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Kota Malang) Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar
14 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Toko Wijaya Tani (Madiun) Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar
14 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - Toko Tiga Jaya (Madiun) Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar
14 Maret 2025	PT Jatim Grha Utama (JGU) - PT Berkat Terang Semesta (Madiun) Tentang Distribusi Beras Jatim Cettar



DUKUNGAN TRANSPORTASI BUS TRANS JATIM

Trans Jatim melayani 7 koridor utama yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur

Koridor	Tanggal Peresmian	Rute
Koridor 1	19 Agustus 2022	Porong (Sda)-Surabaya-Bunder (Gresik)
Koridor 2	21 Agustus 2023	Surabaya-Mojokerto
Koridor 3	18 Oktober 2023	Mojokerto-Balongpangang
Koridor 4	9 Agustus 2024	Bunder (Gresik)- Paciran (Lamongan)
Koridor 5	30 September 2024	Surabaya-Bangkalan
Koridor 6	26 Mei 2025	Porong-Mojosari-Mojokerto
Koridor 7	7 Oktober 2025	Paciran-Dukun(Gresik)-Lamongan



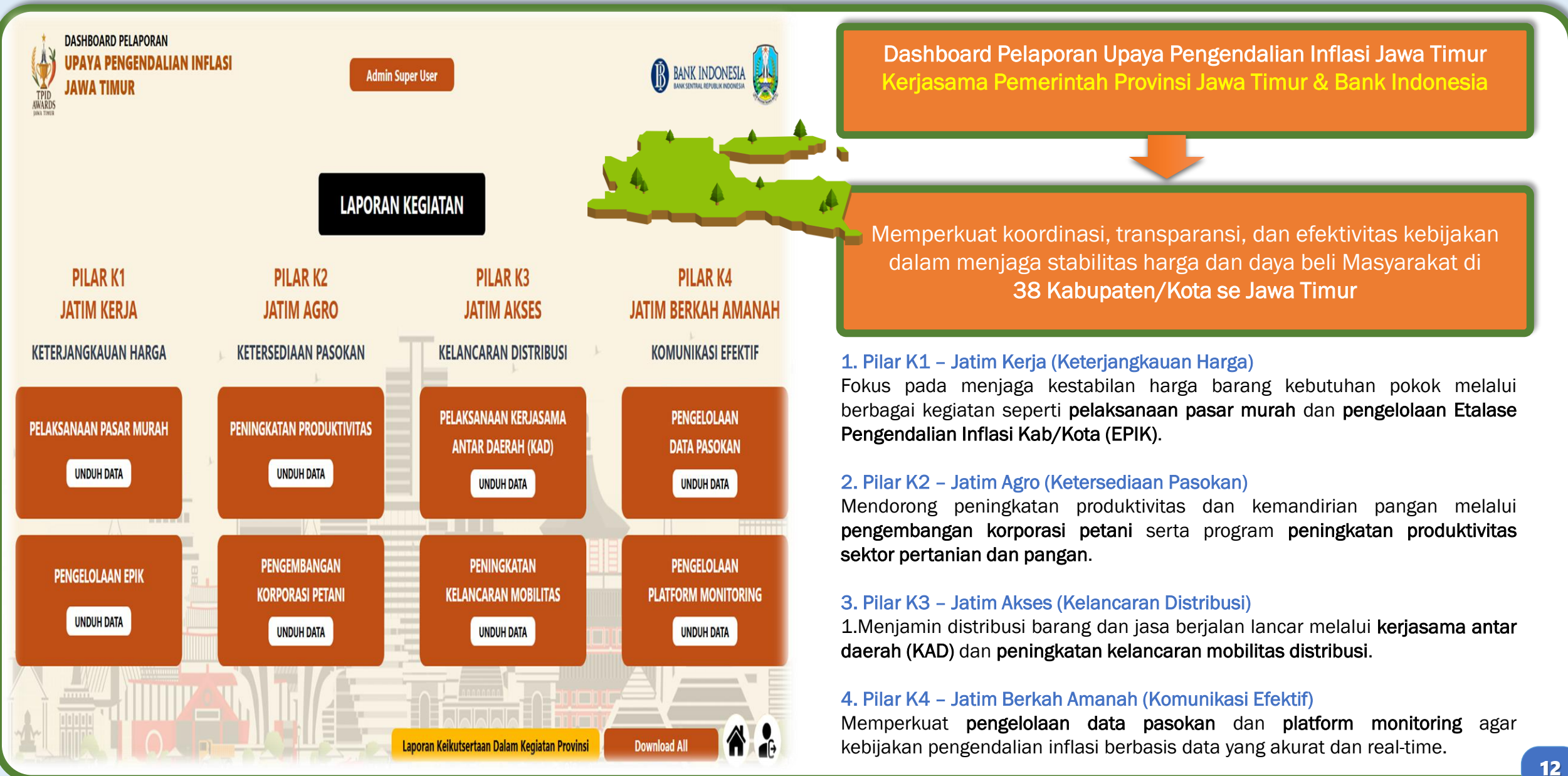
SIDAK PASAR KAB/KOTA DI JATIM

Memastikan ketersediaan pasokan aman dan stabilisasi harga pangan

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
8 Januari 2025	Pasar Wisata Sedati, Kab. Sidoarjo
26 Februari 2025	Pasar Sopenyono Kota Surabaya
2 Maret 2025	Pasar Among Tani, Kota Batu
4 Maret 2025	Pasar Kota Lama, Kab. Bojonegoro
14 Maret 2025	Pasar Genteng Baru Surabaya
24 Juni 2025	Pasar Ragojampi, Banyuwangi
29 Maret 2025	Pasar Besar Kota Madiun
31 Juli 2025	Pasar Tanjung, Kab. Jember
25 Agustus 025	Pasar Sopenyono Kota Surabaya
25 Agustus 2025	Pasar Larangan Kab. Sidoarjo
26 Agustus 2025	Pasar Pon Kota Blitar
27 Agustus 2025	Pasar Gadang, Kota Malang
27 Agustus 2025	Pasar Setono Betek, Kota Kediri
3 Oktober 2025	Pasar Wage, Kabupaten Nganjuk
5 Oktober 2025	Pasar Plaosan, Magetan



Dashboard TPID Jawa Timur (Strategi 4K)



KERJASAMA INTRA PROVINSI (KIP)

Beras JATIM CETTAR 202,5 Ton

KORPORASI PETANI

KOPERASI MULTI PIHAK
SARANA AGRO LESTARI (SANTRI)

- Rapat pembentukan dan penyusunan AD/ART Koperasi pada tanggal 5 Juni 2023
- Anggota 4.641 petani yang tergabung dalam 10 Gapoktan
- Luas Lahan Padi 2.698,66 Ha per tahun
- Produksi Padi 19.876,45 Ton per tahun
- Next : KMP Madiun

HULU

PERAN TPID PROVINSI

APBD dan CSR Bank Indonesia

- Bantuan Logistik/ Ongkos Angkut
- Bantuan Ongkos Tenaga Kasar Bongkar Muat (TKBM)
- Bantuan Color Sorter
- Bantuan Bank Indonesia :
 - ✓ Bantuan Kendaraan Angkut/ Truck (Epik Mobile)
 - ✓ Bantuan Dryer/Pengering
 - ✓ Bantuan Penepung Beras

INTERMEDIASI

ETALASE PENGENDALIAN INFLASI KAB/KOTA (EPIK)

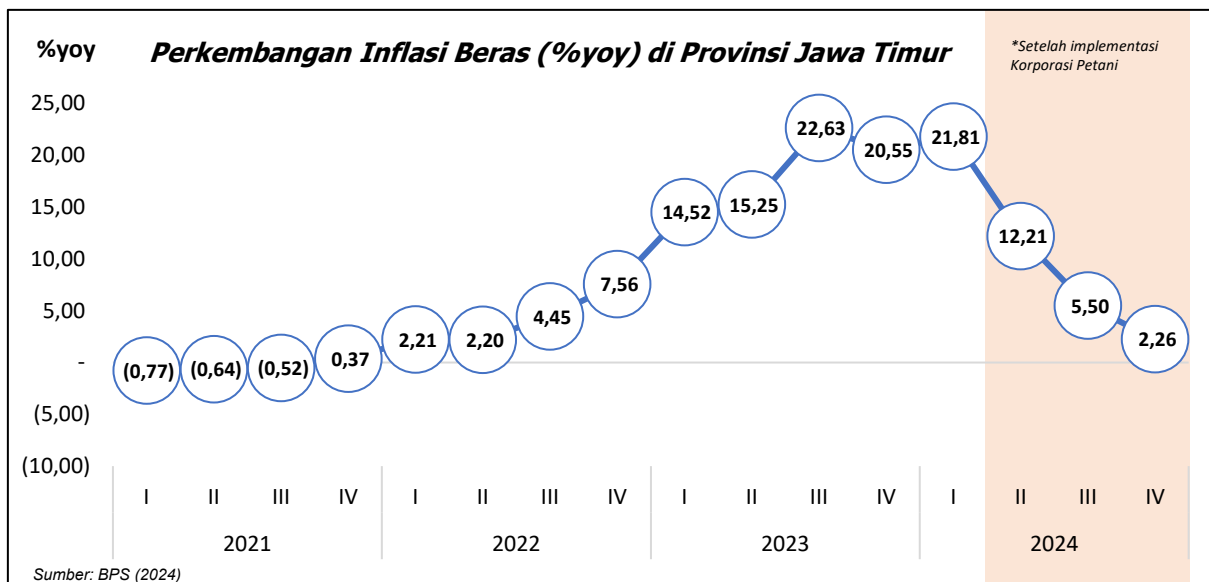
EKOSISTEM

- Toko Inflasi di 8 Kab/Kota dan 13 titik pasar
- JATIM CETTAR, Collective branding menciptakan nilai tambah pada produk, penguatan produk local dan meningkatkan akses pasar

TOTAL PENJUALAN

- EPIK, Maret s.d April 2025 : **31,5 ton**
- BERAS ASN, dengan penjualan selama Agustus 2024 s.d April 2025 : **171 ton**

HILIR



TANTANGAN

- 1) Inflasi Komoditas Beras di Jawa Timur di Tahun 2022. Beras merupakan kebutuhan pangan pokok dan kontribusi andil inflasi terbesar ke 3 (bobot 3,59) setelah bensin/BBM non-subsidi (SBH-BPS 2022);
- 2) Keterbatasan bahan baku pada penggilingan di Desa karena harga gabah tidak terjangkau.

STRATEGI

Penguatan kelembagaan petani dengan Koperasi Petani Multi Pihak, dengan kepemilikan hak suara : (1) Petani sebesar 40%, (2) Investor sebesar 30%, dan (3) Manajemen Bisnis sebesar 30%.

Penguatan ekosistem bisnis dan hilirisasi :

- 1) Kualitas Produksi : bantuan alat dan Standardisasi produk;
- 2) Akses pembiayaan : Kredit Dana Bergulir dan Sistem Resi Gudang;
- 3) Pemasaran : penugasan BUMD sebagai distributor dan mendukung program pengendalian inflasi.



LANDASAN REGULASI





KORPORASI PETANI JAWA TIMUR



Koperasi Produsen Multi Pihak SARANA AGRO LESTARI "SANTRI" KAB JOMBANG

- 1) Beranggotakan 4.641 petani yang tergabung dalam 10 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- 2) Luas Lahan Padi 2.698,66 Ha per tahun;
- 3) Produksi Padi 19.876,45 Ton per tahun.



Koperasi Multi Pihak JATIM MAKMUR SENTOSA (JMS) KAB MADIUN

- 1) Terdapat 21 Kelompok Tani yang tersebar di wilayah Madiun dan Ngawi, dengan anggota 2.272 orang petani;
- 2) Luas rencana tanam mencapai 2.315,42 Ha;
- 3) Jumlah potensi panen sebesar 26.742.000 Kg /Tahun;
- 4) Jumlah kapasitas produksi beras 5.000 Kg /Jam (maksimal produksi 10 jam).



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT TPID PROVINSI JAWA TIMUR

Fasilitasi rapat koordinasi teknis penguatan kelembagaan Korporasi Petani Jawa Timur khususnya efisiensi Agro-Input Pertanian melalui teknologi Pupuk tepat guna untuk efisiensi-produktifitas melalui intensifikasi pertanian, dengan **PT. Saraswanti** dan **PT. Petrokimia Group (Pupuk Indonesia)**.



**PETROKIMIA
GRESIK**
Solusi Agroindustri



PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
FERTILIZER SPECIALIST



"Memperkuat kelembagaan Korporasi Petani Jawa Timur untuk teknologi pupuk pada kerangka intensifikasi pertanian dalam meningkatkan produktivitas"





8 Kab/Kota

- 1) Kota Surabaya
- 2) Kota Madiun
- 3) Kota Kediri
- 4) Kota Malang
- 5) Kab. Sidoarjo
- 6) Kab. Gresik
- 7) Kab Jombang
- 8) Kab Ngawi

LUMBUNG PANGAN- EPIK

1. Meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Kedaulatan pangan; dan
3. Pengendalian inflasi daerah.

Collective Branding

- ✓ Merk "JATIM CETTAR" dapat dimanfaatkan sebagai merek Bersama untuk produk pertanian yang diproduksi oleh kelompok petani/korporasi petani.
- ✓ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk;M
- ✓ Meningkatkan kecintaan konsumen terhadap produk lokal Jawa Timur



Menjaga Stabilitas Inflasi Untuk Mewujudkan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Masih Dibutuhkan Kerjasama Dengan **Cluster** Kab/Kota Lain Dalam Kerangka **Kerjasama Intra Provinsi (KIP)**



LUMBUNG PANGAN- EPIK
REGULER

PT. JGU (BUMD Jawa Timur) akan melakukan Kerjasama Intra Provinsi (KIP) untuk mendistribusikan beras JATIM CETTAR ke berbagai Etalase Pengendalian Inflasi di 8 Kabupaten/Kota (EPIK) dengan memperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan Pemerintah;



LUMBUNG PANGAN- EPIK
MOBILE

Kendaraan truk EPIK Mobile yang merupakan bantuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan biaya operasional kegiatan EPIK Mobile akan ditanggung oleh Program Sinergitas BUMD

- 1) Melalui integrasi antara sistem monitoring harga komoditas dengan kios TPID, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar yang lebih targeted dan tepat sasaran. Hasil monitoring harga dapat langsung ditindaklanjuti melalui operasi pasar yang dilakukan di kios-kios TPID sebagai upaya stabilisasi harga.
- 2) Pembangunan kios TPID (kios tetap maupun mobile) memungkinkan distribusi komoditas pangan yang lebih luas dan merata. Efisiensi biaya distribusi dapat didukung melalui subsidi ongkos angkut dari Pemerintah.



GOVERNOR OF EAST JAVA

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/385/ 013/2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025-2027

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa stabilitas laku inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur. Serta dalam rangka perbaikan kinerja dan percepatan pelaksanaan implementasi pengendalian inflasi daerah di Jawa Timur, perlu diperkuat dengan dasar pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

**SK Gubernur Jawa Timur No:100.3.3.1/385/013/2025,
tgl. 25 Juni 2025, tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2027**

Sumber : Sekretariat TPID Jatim, 2025

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI JAWA TIMUR 2025-2027

4K	Program Strategis	Program Kerja	Program Teknis (Silahkan Disesuaikan)	PIC
Keterjangkauan Harga Stabilitas Ekonomi dan Pengendalian Harga	Penguatan Pelaksanaan Operasi Pasar	1 Penguatan pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka penyediaan komoditas dengan harga terjangkau melalui koordinasi lintas instansi untuk stabilitas harga bahan pokok	1.1 Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			1.2 Intensifikasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilitas harga bahan pokok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1.3 Optimalisasi distribusi SPHP dalam mendukung pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga bahan pokok	Perum Bulog Karwili Jawa Timur
			1.4 Optimalisasi distribusi SPHP	Perum Bulog Karwili Jawa Timur
			1.5 Optimalisasi pemanfaatan EPIK (instore atau mobile) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga stabil	1. Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
			1.6 Program Penguatan peran Koperasi/BUMD/Des sebagai supplier pasokan EPIK	Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur
	2 Optimalisasi pelaksanaan sidak pasar sebagai upaya pemantauan dan pengawasan kesesuaian harga serta ketersediaan stok bahan pokok di tingkat pasar		2.1 Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2.2 Melakukan pengecekan harga barang kebutuhan pokok di tingkat produsen, distributor dan pengecer	Satgas Pangan
	Koordinasi Kebijakan Administered Prices	3 Sinkronisasi kebijakan tarif komoditas Administered Prices dan Pendidikan antar Kab/Kota sebagai langkah antisipatif untuk mencegah inflasi di tingkat Provinsi	3.1 Koordinasi penetapan tarif layanan publik daerah, a.l PDAM dan pendidikan, agar selaras dengan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.	Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur
			3.2 Koordinasi terkait tarif transportasi di daerah agar selaras dengan kebijakan pengendalian inflasi di daerah	Dinas Perhubungan

4K	Program Strategis	Program Kerja	Program Teknis (Silahkan Disesuaikan)	PIC
Ketersediaan Pasokan Kesejahteraan Produsen, Akses Optimal Sarana Produksi Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Peningkatan Produktivitas	4 Peningkatan produksi komoditas peternakan	4.1 Peningkatan produksi komoditas Daging (year-on-year)	Dinas Peternakan
			4.2 Peningkatan produksi komoditas Telur (year-on-year)	Dinas Peternakan
			4.3 Peningkatan produksi komoditas Susu (year-on-year)	Dinas Peternakan
		5 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.1 Fasilitas Sarana Produksi Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			5.2 Fasilitas Sarana Produksi Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			5.3 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		6 Peningkatan pemanfaatan sarana produksi pertanian (saprodi) yang berkualitas (termasuk organik)	5.4 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			6.1 Sertifikasi benih unggul dan bermutu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			6.2 Pemberian bantuan Pupuk Majemuk, Organik, dan Obat- obatan (Tanaman Tebu)	Dinas Perkebunan
		7 Modernisasi alat dan mesin pertanian (asintan) melalui program bantuan dan pelatihan teknis kepada petani	6.3 Pemberian bantuan Pupuk NPK di lahan historis tebu	Dinas Perkebunan
			7.1 Fasilitas Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			7.2 Fasilitas Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pasca Panen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penguatan bimbingan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil produksi	8 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Hortikultura	8.1 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			8.2 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			8.3 Penerapan Good Handling Practices (GHP) Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		9 Penerapan Good Handling Practices (GHP) Tanaman Pangan	8.4 Penerapan Good Handling Practices (GHP) Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			8.5 Pembinaan kelompok ternak dalam penerapan Good Farming Practices (GFP)	Dinas Peternakan
			8.6 Pembinaan terhadap kelompok pembudidayaan ikan (poldakan), dan nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		10 Bimbingan Teknis Akselerasi Swasembada Gula Nasional	8.7 Bimbingan Teknis Akselerasi Swasembada Gula Nasional	Dinas Perkebunan
			9.1 Manajemen Tanaman Sehat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			9.2 Pemantauan luas serangan OPT/DPI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		11 Pemetaan daerah rawan banjir, kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan	9.3 Pemetaan daerah rawan banjir, kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			9.4 Pengembangan early warning system (OPT, Luas Panen, Banjir, Kekeringan, Harga) antara lain berkoordinasi melalui pemantauan kondisi iklim dengan sumber harian data BMKG	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			9.5 Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular	Dinas Peternakan
Pengembangan Kawasan Produksi	12 Penguatan hama dan penyakit serta mitigasi dampak perubahan iklim	13 Penerapan hama uret dan blus pada tanaman tebu	9.6 Penerapan hama uret dan blus pada tanaman tebu	Dinas Perkebunan
			9.7 Buffer stock pengendalian OPT (obat-obatan)	Dinas Perkebunan
			10.1 Teras Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	14 Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi			

4K	Program Strategis	Program Kerja	Program Teknis (Silahkan Disesuaikan)	PIC
Kelancaran Distribusi Penguatan Konektivitas Daerah	Penguatan Kerjasama Antar Daerah, pada level Pemerintah atau Bisnis	20 Penguatan peran Koperasi/BUMD/Des sebagai offtaker strategis untuk memastikan penyerapan hasil produksi petani dengan harga yang layak	20.1 Program Penguatan peran Koperasi/BUMD/Des sebagai offtaker komoditas strategis	Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur
			21.1 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			21.2 Fasilitas Bantuan Logistik untuk Efisiensi Distribusi	Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur
		22 Fasilitas sistem distribusi pangan yang efisien melalui penyediaan armada transportasi	22.1 Fasilitas Mudik dan Balik Gratis Kepulauan	Dinas Perhubungan
			22.2 Fasilitas Mudik Balik Gratis Bus	Dinas Perhubungan
			22.3 Fasilitas Mudik Balik Gratis Sepeda Motor	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Transportasi	23 Pelaksanaan program mudik gratis untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat pada momen HBKN	23.1 Perluasan jaringan angkutan terintegrasi antar kota (Trans Jatim), dalam kota, dan antar pulau untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi pangan yang lebih efisien	Dinas Perhubungan
			23.2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Jawa Timur	Dinas Perhubungan
			23.3 Fasilitas Penyediaan Angkutan Kepulauan (Trans Laut Jatim)	Dinas Perhubungan
		24 Monitoring dan evaluasi tarif angkutan kewenangan Provinsi untuk memastikan kepatuhan operator terhadap tarif yang ditetapkan	24.1 Koordinasi terkait kepatuhan tarif transportasi di daerah	Dinas Perhubungan
			24.2 Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang serta mobilitas masyarakat	Dinas Perhubungan
			24.3 Pemeliharaan Rutin Jalan	PU Bina Marga
Peningkatan Kualitas Infra Struktur dan Konektivitas	26 Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang serta mobilitas masyarakat		26.1	
			26.2	

4K	Program Strategis	Program Kerja	Program Teknis (Silahkan Disesuaikan)	PIC		
Komunikasi Efektif Tata Kelola Efektif, Berdaya Guna, dan Anti Korupsi	Penguatan Koordinasi Pusat - Daerah	27	Penyelenggaraan High Level Meeting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan Provinsi dan Kab/Kota, serta langkah strategis dalam pengendalian inflasi	27.1	High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah	1. Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
		28	Penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi (TPID) melalui forum rapat koordinasi	28.1	Koordinasi/Konsultasi/Rapat Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1. Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
		29	Penyelenggaraan rapat koordinasi wilayah untuk membahas isu-isu regional dan solusi bersama	29.1	Rapat Teknis Tematik Pengendalian Inflasi	1. Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
		30	Penyusunan produk kebijakan pengendalian inflasi yg kredibel sebagai tindak lanjut komunikasi dan koordinasi antar stakeholder untuk menjaga pola ekspetasi dan psikologis konsumen	30.1	Kebijakan Pengendalian Inflasi Provinsi dan Kab/Kota yang disepakati dalam High Level Meeting (HLM) TPID	Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur
	Peningkatan Kualitas Data	31	Penguatan Sistem Informasi Monitoring Harga Bahan Pokok	31.1	Penguatan Sistem Informasi Ketersediaan Pangan Berbasis Pasokan (SISKA-PERBAP)	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
		32	Optimalisasi pemanfaatan portal Satu Data Jawa Timur melalui Penguatan Kualitas dan Keterisian Data Statistik Sektoral	32.1	Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Statistik Sektoral yang memenuhi Proses Bisnis Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32		32.2	Presentase Perangkat Daerah yang memenuhi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Ekspektasi Inflasi	33	Penyusunan neraca pangan daerah untuk mendukung perencanaan ketahanan pangan dan stabilitas harga	33.1	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		34	Diseminasi kebijakan teknis dan kampanye program untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat	34.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		35	Peningkatan transparansi informasi harga melalui platform yang mudah diakses oleh masyarakat umum	35.1	Publikasi Buletin Harga Pangan Melalui Videotron	Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan Kapasitas Pejuang Inflasi	36	Penyelenggaraan TPID Awards Jawa Timur untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi	36.1	TPID Awards Tingkat Provinsi	1. Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur	
	37	Peningkatan kapasitas anggota TPID melalui pelatihan, workshop, dan studi banding	37.1	Capacity Building TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota	1. Biro Perencanaan Provinsi Setdapro Jawa Timur 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur	



JAWA TIMUR
MAJU BERPRESTASI



JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA

TERIMA KASIH

***E-Learning Sumut Berkah
Angkatan V Tahun 2025***



Kamis, 30 Oktober 2025